

EISSN : [27164012](#)

ISSN : [23384751](#)

DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah

Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang, 15118 Banten

MEDIA SOSIAL DAN MODAL SOSIAL : MEMBANGUN AKSI KOLEKTIF DI TENGAH PANDEMI COVID 19

¹Khairil Anam

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: khairil.anam@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

A pandemic can cause a threat of high social vulnerability for village communities so that the government issued a Village Fund BLT policy from 2020. The funds are a reallocation of village funds which should be intended for rural development. The 8 trillion in funds distributed during the pandemic is an effort to protect the government for vulnerable communities, besides that in the process of distribution there are still many practices that do not meet expectations, especially in the midst of weak supervision and accountability that occur at the level of village institutions. This study uses a qualitative approach supported by quantitative data, in addition to seeing the mapping of public responses to the Village Fund BLT policy on social media using Social Network Analysis. As a result, this research has an impact on strengthening community resilience in terms of three modality aspects, social, economic and human resources.

Keywords : Social Capital, Direct Cash Assistance (BLT) Village funds, and Social Media

ABSTRAK

Pandemi dapat menyebabkan ancaman kerentanan social yang tinggi bagi masyarakat desa sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT Dana Desa dari tahun 2020. Dana tersebut merupakan realokasi dari dana desa yang seharusnya diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Dana 8 Triliun yang tersalurkan selama pandemi merupakan upaya perlindungan pemerintah bagi masyarakat yang rentan, disamping dalam proses penyaluran masih banyak praktik yang tidak sesuai harapan, apalagi ditengah pengawasan dan pertanggungjawaban yang lemah yang terjadi pada level insitusi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif, selain itu untuk melihat pemetaan respon public terhadap kebijakan BLT Dana Desa di media social dengan menggunakan Social Network Analyisis. Hasilnya, penelitian ini berdampak pada penguatan kapasitas modal sosial yang dialami oleh warga desa di Kabupaten Tangerang

Kata Kunci : Modal Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa, dan Sosial Media

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas sosial, terdiri dari struktur masyarakat yang tumbuh secara mandiri dan intim. Dalam studinya di Bali, Geertz menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan unit yang organik dan tumbuh secara mandiri yang berbasis kosmologis dan menutupi diri, dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan Bali (Geertz, 1980). Artinya, desa bukan hanya sekedar rezim/sistem pemerintah, melainkan bangunan sosiologis, dimana masyarakat hidup dan melekat di dalam norma, kebiasaan serta interaksi. Sebagai basis sosial, kehidupan masyarakat desa ditopang oleh insitusi dan modal sosial (Sutoro, 2015). Modal sosial dibangun atas dasar kewajiban dan harapan, yang bergantung pada kepercayaan terhadap lingkungan, kemampuan arus informasi, struktur sosial, norma dan sanksi (Coleman, 2009). Desa memiliki modal sosial yang kuat sebagai pondasi, hal ini tercermin dari solidaritas, kebersamaan, dan sifat gotong-royong. Bahkan, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2016, menguraikan prinsip dalam pengaturan desa didasarkan atas keberagaman, kebersamaan dan kegotong-royongan. Namun, dibalik solidaritas yang kuat, masyarakat desa sering menghadapi kerentanan sosial yang menyedihkan, bahkan bisa melumpuhkan ketahanan sosial. Negara menjadi salah satu aktor yang menyebabkan ketahanan sosial masyarakat desa terganggu akibat regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendeskreditkan desa, dari poyek pembangunan yang memicu konflik penguasaan lahan di desa, seperti yang diungkapkan Geertz "Negara adalah produk asing yang berusaha menyerap desa tapi tidak pernah berhasil (Geertz, 1980). Selain itu, faktor alam seperti bencana sosial, kekeringan (Brigita & Sihaloho, 2018; Liborang, 2020) konflik sumberdaya (Indonesia, 2007; Kurniasari et al., 2017; Marina & Hadi Dharmawan, 2011) hingga kerentanan sosial yang diakibatkan oleh penyakit menular, seperti pandemic Covid 19 saat ini (Pabali et al., 2021).

Wabah Covid 19 sudah berlangsung tiga tahun lamanya, menginfeksi sebagian jumlah penduduk baik di desa maupun kota, oleh sebab itu sebagai antisipasi tingkat penularan yang lebih tinggi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), PSBB Transisi hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Implementasi kebijakan pembatasan sosial berdampak pada perubahan aktivitas manusia, baik sosial, ekonomi bahkan ritual keagamaan. Sebagai kelompok masyarakat yang guyub, solid atau *gemeinschaft* (Tönnies, 1887) sulit untuk merubah kebiasaan yang sudah melekat dengan aturan pembatasan sosial. Ditengah pembatasan sosial berlangsung, mereka terpaksa harus keluar rumah untuk beraktivitas normal demi bertahan hidup, mengingat mayoritas rumah tangga miskin yang hidup di desa mengandalkan sektor pertanian (Mutia, 2022). Pembatasan sosial berimplikasi terhadap peningkatan angka pengangguran desa pada tahun 2019 angka pengangguran 3,45% kemudian naik menjadi 3,55% pada tahun 2020 (Jayani, 2020). Akses dan mobilitas terhadap sumber penghidupan menjadi masalah yang menyebabkan menguatnya kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat desa seperti yang terjadi di Madura (Sabariman & Susanti, 2021). Tidak sedikit cara dilakukan untuk keberlanjutan hidup masyarakat desa dengan mengandalkan kemampuan menemukan sumber pendapatan baru seperti yang terjadi pada masyarakat Ambon (Hahury & Soselisa, 2021)

Upaya pengendalian pandemi serta mengurangi tingkat kerentanan akibat

aturan pembatasan sosial, pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya penanganan Kesehatan, perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi (Syarifudin, 2020) Dibalik kebijakan tersebut itu, ada secercah harapan masyarakat desa melalui program Jaring Pengaman Sosial yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, salah satu instrument Jaring Pengaman Sosial yakni Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa. Adapun realisasi penyaluran dana perlindungan masyarakat sekitar selama pandemic sekitar 51,09 triliun, atau 33% dari total alokasi anggaran 154,76 triliun, diantara realisasi bantuan tersebut disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 14, 24 triliun, BLT DD per Mei 2022 sekitar 8 Triliun. (Annur, 2022).

Dana 8 Triliun yang tersalurkan selama pandemi merupakan upaya perlindungan pemerintah bagi masyarakat yang rentan, disamping dalam proses penyaluran masih banyak praktik yang tidak sesuai harapan, apalagi ditengah pengawasan dan pertanggungjawaban yang lemah yang terjadi pada level insitusi desa. Seperti yang dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang semester 1/2020 terdapat 169 kasus korupsi yang berasal dari anggaran dana desa yakni 44 kasus (Bayu, 2020). Namun sejauh ini banyak riset yang menunjukkan implikasi yang positif dari penyaluran BLT Dana Desa untuk masyarakat, seperti riset yang dilakukan Smeru (2020) terhadap 32 desa yang berada di 16 Kabupaten dan 18 Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa desa memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyalurkan BLT dana desa secara mandiri kepada warga desa, meskipun ditengah banyaknya anggapan dan keraguan yang muncul, diantaranya adanya kekhawatiran penyaluran dana desa yang tidak tepat sasaran, rawan terjadinya korupsi, serta konflik kepentingan antara Kepala desa dan seluruh staff pemerintahan desa. Dan banyak studi lainnya seperti yang dilakukan oleh yang menyatakan Implementasi Dana Desa di Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik, meskipun pada praktiknya terdapat permasalahan kurangnya kapasitas pemerintah desa dalam mendistribusikan program pengendalian Covid 19, karena banyaknya program-program limpahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan jumlah 246 desa, setiap tahun desa di Kabupaten Tangerang mendapatkan sunitakan dana desa yang langsung ditransfer ke rekening desa untuk pembangunan desa. Selama Covid 19 ADD reinfocusing untuk pengendalian kerentanan sosial akibat Covid 19 melalui mekanisme penyaluran jaring pengaman sosial atau Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga miskin desa. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan pada saat penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tangerang, seperti masih tumang tindihnya data penerima, kekurangan SDM dsb. Ditengah hambatan yang muncul, publik memiliki peran untuk menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa, apalagi ditengah derasnya arus informasi yang muncul dari *platform* media sosial. Penelitian ini bermaksud memotret bagaimana media sosial memiliki pengaruh bagi penguatan kapasitas modal sosial bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang, sehingga kehadiran media sosial sebagai fungsi pengawasan ditengah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teknologi informasi berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat kontemporer. Pemahaman terhadap perubahan masyarakat saat ini, tentu tidak lepas dari pandangan para pengamat, salah satunya adalah Gustavo, (2005) dalam trilogi bukunya yang berjudul *The information Age: Economy, Society, and Culture*. Sebagai reaksi atas pandangannya yang berlawanan dengan teori sosial post-modern “yang dianggap sering merayakan akhir sejarah”.

Castells memeriksa kemunculan masyarakat, kultur, dan ekonomi yang baru dari sudut pandang revolusi teknologi informasi (televisi, komputer dan sebagainya). Revolusi ini mengkaibatkan reaksi fundamental terhadap sistem kapitalis yang dimulai dari tahun 1980-an dan memunculkan apa yang disebut oleh Castells dengan “kapitalisme informasional” atau juga disebut dengan “masyarakat informasional”. (Gustavo, 2005) Penyebaran masyarakat oposisional yang berdasarkan pada diri dan identitas atau proses yang dengannya aktor sosial mengenali diri dan mengkesampingkan referensi pada sosial lain yang lebih luas atau *they are what they say they are* (Castells 2010b). Pergerakan seperti ini menghasilkan apa yang disebut dengan Marx sebagai “perjuangan kelas”. Namun berbeda dengan Marx, pergerakan didasarkan oleh kesamaan identitas yang berbeda (misalnya ekologis, feminis).

Castells menjelaskan ada 5 paradigma teknologi informasi. Pertama, teknologi yang tereaksi berdasarkan informasi. Kedua, karena informasi adalah bagian dari aktivitas manusia, teknologi ini memiliki efek pervasif. Ketiga, sistem yang menggunakan informasi didefinisikan sebagai “logika jaringan” yang membuatnya bisa mempengaruhi berbagai proses dan organisasi. Keempat, teknologi baru sangatlah fleksibel, membuatnya bisa beradaptasi dan berubah secara konstan. Kelima, teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi berpadu dengan sistem yang terintegrasi. (Castells 2010b)

Castells mengatakan “fungsi dan proses dominan dalam abad informasi semakin tertata di seputar jaringan” yang didefinisikan sebagai perangkat “nodes yang saling terhubung.” Jaringan bersifat terbuka dan mampu dikembangkan secara tidak terbatas dan mampu berinovasi tanpa harus mengganggu sistem. Kehadiran sentralitas jaringan memicu terjadinya pertentangan-pertentangan sosial yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan identitas mereka. Agar gerakan ini berhasil, mereka harus mapan dalam mengaktualisasikan informasi dan jaringan yang kuat. Dalam konteks ini, Castells menggembarakan gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh Zapatistas di Chiapas, Meksiko, Milisi Amerika, environmentalisme dan Feminisme.

Kaplan & Haenlein, (2010) mendefinisikan Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang merupakan pengembangan dari Web 2.0. dan sebagai bagian dari upaya pertukaran User Generated Content (UGC). Ia juga menjelaskan bagaimana awal penggunaan Internet sebagai media baru, dimulai dengan istilah Web 2.0 yang pertama kali digunakan pada tahun 2004 untuk menggambarkan cara baru di mana pengembang perangkat lunak dan pengguna akhir mulai memanfaatkan World Wide Web, sebagai platform di mana konten dan aplikasi tidak lagi dibuat dan dipublikasikan oleh individu, tetapi terus dimodifikasi oleh semua pengguna secara partisipatif dan kolaboratif. Meskipun Web 2.0 tidak

mengacu pada pembaruan teknis spesifik dari World Wide Web, ada seperangkat fungsionalitas dasar yang diperlukan untuk fungsinya. Di antaranya adalah Adobe Flash (metode populer untuk menambahkan animasi, interaktivitas, dan aliran audio / video ke halaman web), RSS (Really Simple Syndication) format feed web yang digunakan untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti entri blog atau berita headline, dalam format standar dan AJAX (Asynchronous Java Script) teknik untuk mengambil data dari server web secara sinkron, memungkinkan pembaruan konten web tanpa mengganggu tampilan dan perilaku seluruh halaman. Dari Web. 2.0 ini kemudian berevolusi menjadi Media Sosial. Kaplan & Haenlein, (2010) dalam (Lim, 2012) media sosial mewarisi karakteristik dan mendorong terjadinya kolaborasi dan interaksi sosial yang lebih luas. Media sosial juga memudahinya terjadinya “produksi konten organik, interaksi dan proses yang tersebar, dan konvergensi format media” . Klasifikasi bermakna untuk menjelaskan karakteristik pembeda di antara macam-macam bentuk media sosial yang beragam, sehingga di bawah ini klasifikasi sosial media menurut Kaplan & Heinlein (2010)

Tabel 1 Klasifikasi Media Sosial

		Media richness Social presence/		
		Low	Medium	High
<i>Self persentati on/self disclosure</i>	Tinggi	Blogs	<i>Social networking sites (Faceboook)</i>	<i>Virtual social Media (Second Life)</i>
	Rendah	<i>Collaborative Projects (wikipedia)</i>	<i>Content Communities (Youtube)</i>	<i>Virtual Game World (World of Warcraft)</i>

Sumber : Kaplan & Heinlein (2010)

Klasifikasi media sosial sebagai berikut. Pertama, mengenai social presence, pada instrumen ini blog yang merupakan bagian dar proyek kolaboratif (misalnya Wikipedia) menempatkan pada posisi sekor terendah, karena hanya berbasis teks hanya memungkinkan untuk pertukaran yang relatif sederhana. Pada tingkat berikutnya adalah konten (misalnya, YouTube) dan situs jejaring sosial (misalnya, Facebook) yang, selain komunikasi berbasis teks, memungkinkan berbagi gambar, video, dan bentuk media lainnya. Pada tingkat tertinggi adalah permainan virtual dan dunia sosial (misalnya, World of Warcraft, Second Life), yang mencoba mereplikasi semua dimensi interaksi tatap muka dalam lingkungan virtual. Instrumen selanjutnya yakni mengenai presentasi diri dan keterbukaan diri/self presentation, blog biasanya mendapat skor lebih tinggi daripada proyek kolaboratif (wikipedia), seperti yang terakhir cenderung difokuskan pada domain konten tertentu. Dengan semangat yang sama, situs jejaring sosial memungkinkan pengungkapan diri lebih banyak daripada komunitas konten. Akhirnya, sosial virtual membutuhkan tingkat pengungkapan diri yang lebih tinggi daripada dunia game virtual, seperti yang terakhir diperintah oleh pedoman ketat yang memaksa pengguna untuk berperilaku dengan cara tertentu (misalnya, sebagai pejuang di tanah fantasi khayalan).

Menurut Hansen et al. (2011) teknologi media sosial telah melahirkan cara-cara interaksi baru, ada ratusan platform media sosial yang berbeda (misalnya, jejaring sosial, pesan teks, foto bersama, podcast, video streaming, wiki, blog, grup diskusi).

Alexa perusahaan informasi Web yang menyediakan peringkat lalu lintas situs web, menawarkan kategori luas untuk mencirikan jejaring sosial, dan media sosial. Dari jumlah tersebut, perusahaan seperti Facebook, YouTube, Blogger, Twitter, MySpace, dan Flickr muncul di semua kategori. Menurut Alexa (2018), Media sosial global teratas pada akhir 2018 yang menjadi favorit pengguna populasi dunia adalah adalah: (1) Facebook; (2) Twitter (3) LinkedIn (4) Pinterest (5).plus.google.com. Selanjutnya Alexa merilis juga top sites yang digunakan oleh aktivis dalam gerakan sosial,, diantaranya adalah (1) change.org (2) Avvaz.org (3) freepublic.om (4) democrazynow.com (5)bugemenot.com.

C. METODE

Paradigma merupakan keseluruhan sistem berfikir, hal ini mencakup asumsi dasar pentingnya pertanyaan yang harus dipecahkan, teknik penelitian yang harus digunakan, dan contoh penelitian ilmiah yang baik (Neuman 2011). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme sosial mengembangkan makna subjektif atas pengalaman partisipan yang diarahkan pada objek-objek benda tertentu (Creswell 2010), tujuannya adalah untuk mengkonstruksi tentang realitas sosial yang ada, dan memungkinkan untuk interpretasi lebih lanjut Setyadi (2016). Neuman (2011) mengategorikan paradigma konstruksionis ini bagian dari ilmu sosial intrpretatif, dia menjelaskan para konstruksionis berpendapat bahwa orang menerima dunia sosial disekeliling mereka “apa adanya” dan berlaku seakan-akan dunia sosial bagian realitas tetap yang alamiah dan subjektif.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, data primer dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan melakukan wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion) dan penyebaran kuisioner. Dalam mengidentifikasi peran media sosial dalam penyaluran BLT pengambilan data media sosial (crawling data) seperti twitter dengan bantuan bahasa pemrograman Python 3. Untuk mendapatkan akses pengambilan data percakapan di Twitter, peneliti terlebih melakukan registrasi melalui application program interfaces (API) Twitter. Setelah data percakapan berhasil didapat, selanjutnya data diolah dengan bantuan program PHP. Adapun pengambilan Social Network Analysis dengan menggunakan platform data analysis yang dikembangkan oleh Drone Emprit Academic (DEA) (Fahmi 2012). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi formal atau informal, terkait dengan lokasi penelitian, baik dari kelurahan, kecamatan, BPS, data Pemerintah Kabupaten Tangerang.

D. TEMUAN HASIL PENELITIAN

1. Menjawab Respon Publik Terhadap Penyaluran BLT Dana Desa

Keintiman aktor dalam Masyarakat Jaringan terutama di media sosial memicu respon terhadap proses penyaluran BLT DD, Gambar 2 menunjukkan bagaimana tingginya volume percakapan di media sosial (Twitter) terkait dengan *keyword* dana desa, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial tunai selama periode 2020 s.d. 2022. Hal ini berimplikasi terhadap pro dan kontra kebijakan Penyaluran BLT Dana Desa, banyak yang menganggap bahwa kebijakan ini cenderung populis dan politis, ada juga yang menganggap bahwa kebijakan ini rawan terjadi penyelewengan dari aparat desa, dan desa belum siap untuk menyalurkan BLT

ini mengingat sebagian dana sudah dialokasikan untuk program pembangunan desa.

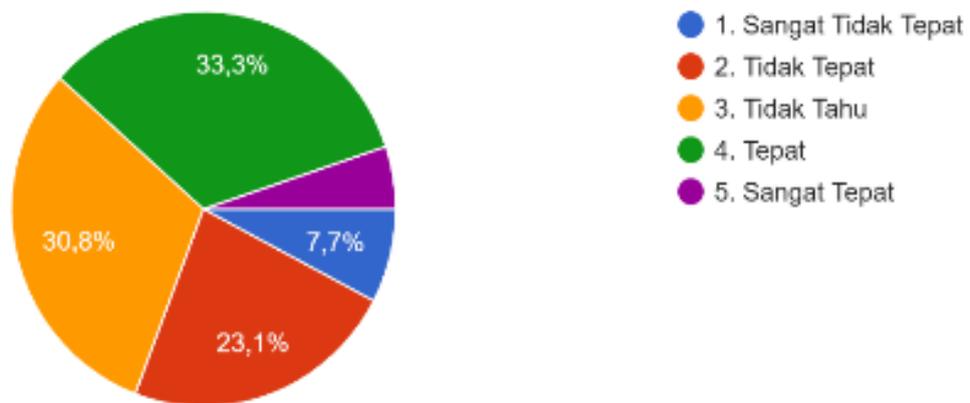


Gambar 1. Social Network Analysis Percakapan isu BLT Dana Desa

Gambar 1 menjelaskan intimasi aktor dalam jaringan, menjelaskan terjadinya pengkubuan aktor saling kontradiktif dalam membicarakan isu BLT Dana Desa. Terdapat dua *cluster* yang saling intens memperbincangkan dengan *keyword* yang berbeda yakni Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai, terlihat intensitas masing-masing akun tersebut dengan tingkat *betwensness* yang sangat tinggi. Namun, diantara dua *cluster* tersebut tidak ditemukan *cluster* pembanding sebagai narasi untuk mengcounter Kebijakan BLT DD ini. Artinya, dengan Pemetaan Jaringan ini dapat disimpulkan bahwa public menial positif terkait dengan penyaluran BLT Dana Desa sebagai upaya pemerintah untuk membantu meringankan beban warga desa pada masa Covid 19. Artinya hanya sedikit actor yang merasa hawatiran yang muncul, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, penyelewengan dana desa dan korupsi. Meskipun demikian ini meruapakan bagian dari kritik perbaikan yang harus menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam penyaluran BLT DD agar sesuai dengan penerima manfaatnya. Lebih lanjut, dari hasil analisis sentiment terkait dengan isu BLT Dana Desa ini juga memiliki korelasi yang sama dengan hasil pemantauan SNA di atas, seperti pada gambar 4 menjelaskan bagaimana analisis sentiment terhadap isu BLT Dana Desa ini dalam percakapan di media social. Hasilnya menunjukkan dari total 197,572 percakapan di media social terkait dengan dana desa, 134,900 memberikan respon positif terkait penyaluran BLT Dana Desa ini, dan hanya 16,800 lainnya memberikan respon negative terhadap penyaluran BLT ini. Hasil ini semakin menunjukkan bahwa public merasa antusias dengan penyaluran BLT Dana Desa ini agar dapat meringankan beban warga desa dari ancaman kerentanan social yang diakibatkan oleh pandemic Covid 19.

2. Efektivitas Penyaluran BLT Dana Desa

Berdasarkan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, penerima sasaran BLT-DD adalah keluarga miskin nonpenerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang (i) kehilangan mata pencaharian, (ii) belum terdata, dan (ii) mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/kronis. Dalam praktiknya, warga penerima program bansos dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDD.

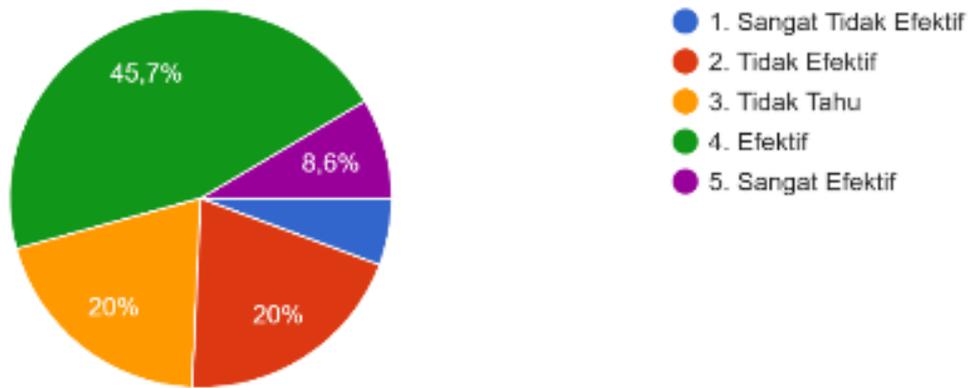


Gambar 2. Grafik 1 Persepi Publik terhadap Ketetapan Penyaluran BLT Dana Desa di Kab. Tangerang

Desa tampaknya juga berkepentingan untuk membuat pengecualian tersebut agar penyaluran BLT-DD tidak bertumpang-tindih dan kecemburuan sosial antarwarga tidak terjadi. Desa bersikap hati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT-DD. Hal ini tercermin dari hasil penyebaran survey persepsi Publik terhadap ketetapan penerima BLT Dana Desa. Dari Grafik 1 dapat dijelaskan bahwa 35,3 % publik merasa penerima BLT Dana Desa sudah tepat, namun banyak juga yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa tidak tepat sasaran, dengan angka 29,8%. Gap yang rendah ini menunjukkan kekhawatiran bagi warga desa, adanya alokasi BLT yang tidak sesuai dengan penerima manfaatnya.

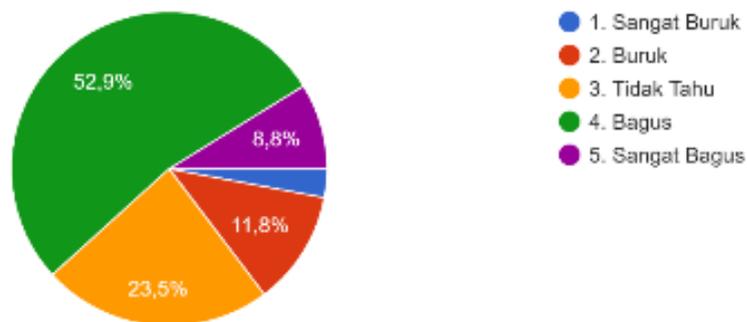
Fremont E. Kas dalam Sugiyono (2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang

dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif. (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 3. Pelayanan Penyaluran BLT Dana Desa

Dari sisi pelayanan 52,9% responden menyatakan bahwa pelayanan penyaluran BLT Dana Desa Bagus, 23,5% menyatakan tidak tahu, 11,8% diantaranya Buruk dan 8,8% menyatakan sangat bagus, artinya 61,7% responden menyatakan pelayanan BLT Dana Desa sudah bagus, hal ini dilatarbelakangi oleh koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan aparat dan juga partisipasi warga.



Gambar 4. Persepsi Keefektivan Penyaluran BLT Dana Desa

Untuk mempermudah pelayanan penyaluran BLT DD, banyak responden yang memberikan saran agar penyaluran dilakukan secara *cash less* melalui transfer rekening langsung kepada penerima sehingga lebih efektif dan menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh oknum aparat desa.

3. Aksi Kolektif dan Penguatan Modal Sosial Desa

Kehadiran BLT Dana Desa merupakan bagian dari upaya untuk membangun Resiliensi Komunitas di Tangerang. Mengingat mayoritas penduduk di Kabupaten Tangerang merupakan warga desa. Melalui BLT Dana Desa, Pemerintah

Kabupaten Tangerang berharap agar uang bantuan itu dapat berputar lama di desa, sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan begitu, daya beli masyarakat meningkat dan mampu menggerakkan sector ekonomi informal di Kabupaten Tangerang. Hal ini tercermin dari Grafik dilakukan bahwa kehadiran dana desa mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari bagi penerima BLT DD, diantaranya 36% merasa Sangat Bisa bahwa dana BLT DD digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun banyak juga yang menganggap bahwa BLT Dana Desa belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Adapun Jenis kebutuhan sehari-hari yang dibeli oleh responden dari BLT Dana Desa tersebut adalah sebagai berikut :

Jenis Pengeluaran	Presentase
Beli Beras	50 %
Tambahan modal	12,7%
Bayar Uang sekolah	10,9%
Beli makanan	5,5%
Bayar Hutang	5,5%

Tabel 2. Jenis Pengeluaran dari BLT Dana Desa

Dari dua indikator diatas dapat disimpulkan bahwa BLT Dana Desa yang diberikan oleh Anggaran Dana Desa dapat menguatkan modalitas dari sisi ekonomi terlihat dari tingginya nilai presentase responden yang menyatakan bahwa kehadiran BLT Dana Desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun, nominal yang diberikan tidak serupa dengan pendapatan harian, namun kehadiran dana desa setidaknya membantu mengurangi tingkat resiko kebencanaan

Aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara Bersama untuk mencapai kepentingan Bersama, yang merupakan hasil interaksi antar satu kelompok dengan kelompok lain, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan kolektif (Tilly 1978) Aksi kolektif sebagai aksi yang dilakukan oleh kelompok baik secara langsung atau atas nama organisasi dalam mencapai apa yang oleh anggota kelompok itu dianggap sebagai kepentingan Bersama (Gupta 2000) Aksi kolektif adalah proses pengambilan keputusan Bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa secara sukarela oleh partisipasinya yang membedakannya dengan usaha kolektif oleh kelompok-kelompok pekerja yang dibayar (Nugroho 2006). Setiap aksi kolektif senantiasa melibatkan :

- Organisasi untuk mendesain aturan-aturan main melaksanakan aksi kolektif

- Menggalang proses partisipasi
- Menegakkan aturan-aturan yang diterima, yang dianggap telah memberikan manfaat bagi kelompok

Meskipun terdapat manfaat non material yang diperoleh melalui aksi kolektif, namun tidak dipungkiri juga terdapat manfaat yang bersifat material mempengaruhi kemunculan berbagai aksi kolektif.

Pengurangan resiko bencana yang dipersiapkan oleh komunitas dalam kerja-kerja pengorganisasian social berhasil membangun aksi-aksi pengurangan bencana secara kolaboratif Tidak ada klaim bahwa satu pihak lebih dipentingkan dalam persoalan kebencanaan, masing-masing pihak memiliki kapasitas dan kemampuannya Resiliensi komunitas tidak dapat dibaca dalam konteks kekinian saja, resiliensi komunitas merupakan proses terus menerus yang tidak pernah usai Resiliensi komunitas dapat dibaca oleh kerja, aksi kolektif dan Tindakan yang telah , sedang dan akan komunitas kerjakan. Dalam konteks kebencanaan resiliensi adalah upaya untuk membangun aksi kolektif.

Penyaluran BLT Dana Desa memberikan efek terhadap partisipasi warga dalam membantu Pemerintah Desa untuk mengendalikan kerentanan social yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19. Kehadiran relawan desa sebagai gugus tugas yang melakukan pendataan, verifikasi dan validasi membuktikan semangat kerelawanan meningkat karena didorong oleh kepentingan Bersama antar warga dan pemerintah desa agar dapat keluar dari resiko bencana Covid 19. Hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa selama Covid 19 Warga desa saling bersedia memberikan sumberdaya yang dimiliki untuk membantu sesama salaam covid 19. Grafik 5 dan 6 menunjukkan tingkat keinginan saling membantu antar warga desa di Kab Tangerang untuk membantu selama Covid 19. Jika dilihat dari sisi modalitas social, warga desa di Kab Tangerang memiliki modal social yang cukup untuk bisa resiliensi atau bertahan apabila ada ancaman bencana alam amupun non alam. Modal social yang membuat masyarakat memiliki kekuatan dan kelebihan sumberdaya yang lebih akan membantu masyarakat yang kekuatannya lemah atau rentan seperti ibu-ibu, anak-anak atau lansia. Selain itu, jaringan social yang dimiliki oleh warga desa juga ikut menentukan penguatan kelembagaan desa sehingga peran desa memberikan dampak yang jauh lebih besar dari sekedar melakukan penyaluran BLT Dana Desa.

Modalitas	Kebutuhan
Sosial	Kehadiran relawan gugus desa menjadi simpul Gerakan kerelawanan yang mengajak warga desa untuk membantu satu sama lain
Ekonomi	Kehadiran BLT DD memberikan kebermanfaatan bagi penerima untuk bisa bertahan ditengah Covid 19 Kehadiran dana desa juga membangkitkan ekonomi informal desa dan meningkatkan daya beli masyarakat
Sumber Daya Manusia	Aparat desa yang transformative serta dukungan relawan menjadi kunci keberhasilan penyaluran BLT Dana desa terlihat dari efektivitas pelayanan dan penyaluran BLT Dana Desa

Tabel 3. Modalitas Masyarakat Kabupaten Tangerang

Dari ketiga modalitas yang dimiliki oleh masyarakat Kab Tangerang membuktikan bahwa masyarakat Kab Tangerang dalam menghadapi Covid 19 mampu menjadi masyarakat yang resilien dan menghindari dari tingkat kerentanan social yang diakibatkan oleh Covid 19. Modal Sosial ditunjukkan dengan Kehadiran relawan gugus desa menjadi simpul Gerakan kerelawanan yang mengajak warga desa untuk membantu satu sama lain, dari sisi modalitas ekonomi Kehadiran BLT DD memberikan kebermanfaatan bagi penerima untuk bisa bertahan ditengah Covid 19. Kehadiran dana desa juga membangkitkan ekonomi informal desa dan meningkatkan daya beli masyarakat dari Aspek Modalitas Sumber Daya Manusia Aparat desa yang transformative serta dukungan relawan menjadi kunci keberhasilan penyaluran BLT Dana desa terlihat dari efektivitas pelayanan dan penyaluran BLT Dana Desa.

E. KESIMPULAN

1. Desa sebagai bangunan structural dan sosiologis memiliki peran yang baik dalam membantu pemerintah untuk mendistribusikan penyaluran BLT Dana Desa. Peran partisipasi warga desa menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan bagi penyelenggaraan program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat desa
2. Kehadiran BLT Dana Desa menguatkan modal ekonomi bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga BLT Dana Desa sangat membantu membangun salah satu aspek Resiliensi Komunitas
3. Disamping dapat menguatkan modal ekonomi, kehadiran BLT Dana Desa juga memberikan kesempatan partisipasi yang aktif dengan melibatkan masyarakat sebagai relawan pendata, gugus tugas pendataan, dan upaya lainnya. Hal ini berimplikasi pada penguatan modal social bagi masyarakat desa

4. Modalitas Sumber Daya yang dimiliki oleh desa, kepemimpinan yang transformatif, serta Tangguh adalah kunci agar terciptanya suasana yang saling membantu satu sama lain.

Saran

Bagi akademisi/peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan yang dilakukan secara komprehensif bagaimana model membangun resiliensi komunitas dengan memanfaatkan Dana Desa yang ada. Sehingga model tersebut dapat dioperasionalkan bagi desa, Langkah-langkah untuk membangun resiliensi komunitas

REFERENSI

- Brigita, S., & Sihalo, M. (2018). Livelihood Strategy, Vulnerability, and Resilience of Farmer Household in Flooded Area. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(2), 239.
- Coleman, J. S. (2009). Social capital in the creation of human capital. *Knowledge and Social Capital*, 94, 17–42. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Hahury, H. D., & Soselisa, F. (2021). Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 2021. <http://ppm.ejournal.id>
- Indonesia, N. (2007). *Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia*. 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5936>
- Kurniasari, N., Satria, A., & Rusli, S. (2017). Konflik Dan Potensi Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kerang Hijau Di Kalibaru Jakarta Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2), 207. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v7i2.5686>
- Liborang, H. F. (2020). Kerentanan Dan Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabre. *Jurnal FAPERTANAK: Jurnal Pertanian Dan Peternakan*, 5(2), 8–12.
- Marina, I., & Hadi Dharmawan, A. (2011). Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 90–96. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5830>

- Pabali, M., Adi, S., & Rizqi Ratna, P. (2021). Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 180-188. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/10032/7397>
- Sabariman, H., & Susanti, A. (2021). Kerentanan Sosial Ekonomi dan Resiliensi Keluarga Petani Miskin Selama Pandemi COVID-19: Kasus Dari Madura. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(01), 1-13. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.1>
- Sutoro, E. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru Ide , Misi dan Semangat UU Desa (Pertama)*. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Tönnies, F. (1887). *Community and Civil Society* (J. Hariris & M. Hollis (eds.)). Cambridge University Press.